

ANALISIS PENGELOLAAN OBAT PADA TAHAP PENGADAAN DI INSTALASI FARMASI RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG

Oleh:

Jumriati Rauf, Sukri Palutturi, Reza Aril Ahri
Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI)

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis pengelolaan obat pada tahap pengadaan di RSUD La Temmamala Soppeng tahun 2018.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi langsung, telaah dokumen serta *Focus Group Discussion* (FGD). Informasi yang dikumpulkan dari 4 orang yaitu 1 Informan Kunci, 1 Informan Utama serta 2 Informan Pendukung yang terlibat dalam hal pengadaan obat di instalasi Farmasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengadaan obat di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng sudah melaksanakan pengadaan obat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, namun hasil analisis tahap pengadaan obat di Instalasi Farmasi masih sering melakukan pengadaan obat secara Offline disebabkan ketersediaan obat pada E_catalog sering kosong, serta pengadaan obat berdasarkan laporan dari persediaan obat masih menggunakan system manual sehingga pengadaan obat bukan berdasarkan jumlah obat yang keluar (diresepkan) tapi hanya melihat kondisi gudang saja hal ini menyebabkan peningkatan pengadaan obat karena pengeluaran obat tidak sinkron dengan laporan persediaan di farmasi karena tidak adanya control terhadap jumlah obat yang keluar.

Penelitian ini merekomendasikan agar pihak manajemen segera mengupayakan system yang digunakan bagian instalasi farmasi secara online agar pengadaan obat bisa ditekan berdasarkan data stock opname baik yang ada di depo dengan yang ada di gudang farmasi, selain itu sebaiknya manajemen melakukan evaluasi terhadap pihak ketiga yang bekerjasama dengan Instalasi farmasi yang bisa menyediakan obat yang lebih lengkap.

Kata kunci : *Tahap Pengadaan Obat, Instalasi Farmasi RSUD La Temmamala Kab.Soppeng*

PENDAHULUAN

Instalasi farmasi adalah salah satu bagian/ unit/devisi atau fasilitas di rumah sakit ,tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditunjukkan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Berdasarkan definisi tersebut maka instalasi farmasi rumah sakit secara umum dapat diartikan sebagai suatu departemen atau unit bagian di suatu rumah sakit dibawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa apoteker yang memenuhi persyaratan perundang –undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan langsung kepada penderita baik untuk penderita rawat

inap,rawat jalan maupun semua unit termasuk poliklinik rumah sakit (Niertiningsih, 2017).

Pentingnya pengelolaan obat di instalasi farmasi dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal di rumah sakit,maka ada proses pengelolaan obat perlu diawasi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan operasionalnya sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan untuk hal pelaksanaan pengelolaan obat yang masih dianggap belum optimal (Febriani & Chalidyanto, 2016)

Apabila rumah sakit tidak mampu merencanakan dan melaksanakan manajemen obat dengan baik maka rumah

sakit tersebut tidak mampu mencapai titik keberhasilan. Kegagalan manajemen logistik akan menurunkan kualitas pelayanan rumah sakit sehingga kepuasan pasien pun juga akan ikut menurun.

RSUD La Temmamala memiliki Instalasi Farmasi yang dikepalai oleh seorang apoteker dan dibantu oleh 3 penanggung jawab di setiap bagian yaitu penanggung jawab dari apotek/DEPO Rawat Jalan, Penanggung Jawab dari depo rawat inap dan penanggung Jawab dari gudang farmasi serta 41 Staf Lainnya.

Berdasarkan data dari rumah sakit kunjungan Pasien di tahun 2017 untuk rawat jalan berjumlah 94106 atau rata-rata kunjungan perhari sebanyak 274 kunjungan. Jumlah kunjungan paling banyak pada poliklinik interna sebanyak 24.233 kunjungan atau 25,75%, sementara kunjungan paling sedikit terdapat pada Poliklinik Gizi sebanyak 31 kunjungan atau 30%, sedangkan kunjungan pasien tahun 2017 untuk rawat inap sebanyak 12349 jumlah kunjungan. kunjungan yang paling banyak tetap pada pelayanan penyakit interna sebanyak 3165 atau 25,63% sedangkan jumlah kunjungan perawatan yang paling sedikit kulit kelamin sebanyak 34 kunjungan atau 28% (Profil RSUD Latemmamala, 2017)

Adapun anggaran untuk pengadaan obat Tahun 2017 yaitu 30% dari seluruh total anggaran pelaksanaan kegiatan di UPTD RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng sebanyak Rp.8.000.000.000,- untuk jumlah pengadaannya sebanyak Rp.10.830.159.880,-, sedangkan jumlah pendapatan instalasi farmasi Rp.9.435.240.978,- (Laporan Keuangan RSUD La temmamala, 2017)

Berdasarkan survei awal melalui wawancara dengan Kepala Instalasi Farmasi di UPTD RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng bahwa, dengan meningkatnya jumlah kunjungan pasien maka secara otomatis kebutuhan obat juga meningkat sementara pada saat ini sediaan obat di instalasi farmasi masih belum stabil atau

belum normal kembali disebabkan keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga dan melakukan lock (kunci) sehingga banyak sediaan obat di instalasi farmasi kehabisan stok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Metode kualitatif menerapkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang didapat diamati. Pendekatan studi kasus dipilih karena sesuai dengan subyek, masalah, dan tujuan penelitian yang diharapkan. Studi kasus memungkinkan penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD La Temmamala Soppeng yang berada di Jalan Malaka Raya Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

TEKNIK PEMILIHAN INFORMAN

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan secara non probabilitas. Informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.

Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah, Perencana, penanggung jawab instalasi, staf administrasi farmasi, dan ketua Unit Layanan Pengadaan

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara mendalam
- b. Observasi
- c. Studi dokumentasi
- d. Focus Group Discussion

HASIL PENELITIAN

a. Persiapan perencanaan dalam penentuan kebutuhan obat, jenis, jumlah dan waktu pemesanan obat di instalasi Farmasi

Menurut informan obat-obatan yang akan diusulkan dalam perencanaan harus sesuai formularium yang telah disusun oleh komite farmasi dan Terapi yakni obat-obat generik dan adapula yang branded (paten)dari hasil wawancara dan didukung dengan telaah dokumen berupa laporan pengadaan obat dari bulan Januari sampai bulan Juni 2018 bahwa obat yang diadakan berjenis tablet, kapsul, injeksi, sirup dan lain sebagainya. Selain itu peneliti juga mengetahui pemilihan jenis obat juga didasarkan pada pemakaian obat pasien.hal ini disampaikan informan sebagai berikut :

" tahap pertama melalui tahap pemilihanyaitu untuk menentukan jenis obat yang akan digunakan di RS,pemilihan ini merupakan kewenangan Komite Farmasi dan Terapi untuk dijadikan dasar untuk penyusunan Formularium RS" (Inf 01)

" hingga saat ini dalam perencanaan obat di RSUD La Temmamala dibuat oleh Kepala Instalasi Farmasi berdasarkan dari Laporan Persediaan dari Gudang Farmasi" (Inf 02)

" Dalam proses perencanaan obat itu di rumah sakit menggunakan system 1,2 artinya 1 untuk generik 2 untuk Branded (paten)" (FGD)

" Perencanaan pemilihan obat juga melihat dari slowmoving obat serta fastmoving obat" (FGD)

Setelah melakukan telaah dokumen menemukan bahwa dalam penyusunan perencanaan kebutuhan obat melakukan analisis kebutuhan tidak hanya berdasar pagu anggaran sebelumnya akan tetapi mempertimbangkan selain jumlah kunjungan tetapi juga memperhatikan penambahan dokter spesialis di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng. Selain itu mmeperhatikan pagu anggaran belanja obat

tahun yang akan datang sehingga tidak terjadi devisit anggaran.

b. Pada tahap persiapan metode yang harus digunakan dalam pengadaan obat

Hasil penelitian di RSUD La Temmamala menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan obat menggunakan metode konsumsi yakni berdasarkan pada data pemakaian obat tahun sebelumnya atau dengan melihat stok persediaan obat yang ada di gudang Instalasi Farmasi serta mengkompilasi dengan metode epidemiologi, selain itu disesuaikan dengan anggaran yang telah disediakan oleh manajemen hal ini didukung dengan hasil wawancara

" Perencanaan kebutuhan obat menggunakan metode konsumsi yaitu mengestimasi penggunaan obat tahun sebelumnya selain itu kadang mengkompilasi dengan metode epidemiologi dengan memperhatikan trend penyakit pada tahun yang akan datang dan berdasarkan laporan-laporan dari dinas kesehatan dan rumah sakit" (Inf 01)

" Selain itu memperhatikan system anggaran sehingga menggunakan sistem VEN (Vital, Esensial, Nonesensial" (Inf 01)

c. Dalam tahap persiapan harus melaksanakan sesuai dengan prosedur (SOP)

SOP kegiatan pengadaan obat di Instalasi Farmasi dibuat oleh Kepala Instalasi Farmasi RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng dan ditetapkan serta ditandatangani oleh Direktur. SOP yang berlaku pada tahun ini pada dasarnya masih menggunakan SOP pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan

" Ada semua Standar Operasional Prosedurnya,mulai dari perencanaan sediaan Farmasi,pemilihan/seleksi obat,permintaan sediaan farmasi,stock opname,retur kedistributor" (Inf 01)

"kita tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur"(Inf 02)

" Sesuai standar pelayanan minimal semua tindakan yang dilakukan harus ada SOP"(Inf 04)

d. Pada tahap persiapan ada beberapa kendala yang sering terjadi pada tahap pengadaan obat di instalasi farmasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara mendalam serta data sekunder, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengusulan kebutuhan obat di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng pada dasarnya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Obat yang masuk dalam pengusulan obat juga berdasarkan formularium dan metode konsumsi, namun dalam pelaksanaannya terkadang terdapat masalah yang berkaitan dengan pengusulan kebutuhan obat yang tidak sesuai dengan realisasi termasuk anggaran yang disediakan oleh manajemen tidak mencukupi kebutuhan obat Instalasi Farmasi, adapun hasil wawancara dengan informan

" Anggaran tidak mencukupi kebutuhan obat karena semakin meningkatnya jumlah kunjungan ke RSUD La temmamala"(Inf 01)

"Anggaran untuk sekarang sudah berlebih belanjanya dalam hal pengadaan obat"(Inf 02)

" Belanja obat-obat sudah melebihi anggaran di sebabkan karena perencanaan tidak memperhitungkan hutang tahun lalu yang harus dibayarkan tahun ini"(Inf 04)

" Anggaran yang sudah diajukan kepada manajemen tidak mencukupi kebutuhan obat di Instalasi Farmasi karena dilihat dari factor kunjungan pasien semakin meningkat selain itu karena penambahan dokter ahli yang otomatis masing-masing

membutuhkan obat yang berbeda dan beraneka macam jenisnya" (FGD)

e. Langkah yang dilakukan unit Pengadaan jika terjadi kekosongan atau stockout obat di Instalasi Farmasi

Berdasarkan keterangan dari informan utama dapat disimpulkan bahwa langkah yang ditempuh jika terjadi kekurangan atau kekosongan obat di RSUD La Temmamala melakukan belanja langsung atau meminjam ke Rumah Sakit tetangga atau pinjam ke Dinas Kesehatan hal ini berdasarkan hasil wawancara mendalam

" Segera melakukan usulan pengadaan obat ke Unit Layanan Pengadaan" (Inf 01)

" Melakukan belanja langsung atau melakukan pinjaman ke Dinas Kesehatan atau ke RS tetangga"(Inf 02)

" Melakukan pinjaman ke rumah sakit terdekat setelah ada pengadaan di RSUD La Temmamala kemudian digantikan" (Inf 04)

" Kalau memang obat tersebut pemakaiannya maka sangat dibutuhkan maka akan melakukan pengadaan secara langsung"(FGD)

" ULP harus memiliki prediksi tentang pengadaan obat, dan kami memiliki SOP tentang kekosongan obat kalau rentang waktunya 1 jam baru pinjam ke dinas kesehatan, kalau rentang waktunya 8 jam maka pinjam ke rumah sakit tetangga, kalau rentang waktunya 24 jam maka akan melakukan pengadaan langsung" (FGD)

f. Usulan obat yang di ajukan kepala Instalasi Farmasi kepada Komite Farmasi untuk system persiapan pengadaan obat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci bahwa usulan obat telah disampaikan kepada Komite Farmasi dan Terapi untuk dijadikan dasar penyusunan Formularium Rumah Sakit, namun dalam pelaporan masih bersifat manual karena SIM RS belum berfungsi secara baik sehingga pengajuan obat

kadang tidak terkoneksi dengan jumlah obat yang keluar melalui resep dari Depo Farmasi, hal ini didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Usulan obat yang diajukan kemudian diseleksi oleh Komite Farmasi dan Terapi untuk di masukkan dalam formularium rumah sakit, setelah itu usulan yang sudah dimasukkan dalam formularium rumah sakit diusulkan ke bagian perencanaan manajemen untuk dimasukkan kedalam anggaran pokok untuk pengadaan obat"(Inf 01)

" Setelah sudah ditetapkan anggaran pokok untuk pengadaan obat maka kami melakukan pengadaan obat sesuai dengan usulan yang diajukan oleh kepala Instalasi Farmasi tetapi sering mengalami keterlambatan pengadaan obat karena system laporan persediaan yang akan dijadikan dasar kebutuhan masih menggunakan manual"(Inf 02)

" Laporan bulananku kak yang menjadi dasar pengadaan obat, karena laporan ini saya ajukan kepada Instalasi Farmasi tetapi sering mengalami keterlambatan karena masih menggunakan system manual" (Inf 04)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka disimpulkan bahwa Pertama yang dilaksanakan untuk pengadaan melakukan pemilihan obat yang menjadi kewenangan dari Komite Farmasi dan Terapi sebagai dasar untuk penyusunan formularium RS, metode yang digunakan yaitu metode Konsumsi yang biasa dikompilasi dengan metode Epidemiologi. Hal ini yang sangat berpengaruh yaitu anggaran yang disediakan oleh pihak manajemen belum mencukupi kebutuhan obat yang diajukan oleh Kepala Instalasi Farmasi disebabkan karena peningkatan jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit serta penambahan jumlah dokter ahli, dalam proses pengadaan memiliki Standar Operasional Prosedur sebagai Standar pekerjaan tetapi yang laporan persediaan masih menggunakan system manual

sehingga hal ini bisa memperlambat pengadaan obat di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng.

a. Tahap pemilihan penyedia

Pada tahap pemilihan penyedia ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pengadaan obat harus melalui

1. Metode pemilihan penyedia harus melalui *E-purchasing* dan serta harga obat harus sesuai dengan harga *E-Catalogue*,

Berdasarkan hasil wawancara terkadang pengadaan obat melalui belanja langsung tanpa melalui *E-purchasing* dengan pertimbangan obat yang dipesan melalui *E-purchasing* sering mengalami keterlambatan pendistribusiannya. Setelah memesan obat pada satu penyedia dan bersedia untuk mengirimkan ternyata penyedia ini baru mau memesan ke pabrikan. Pada kenyataannya obat ini sangat dibutuhkan jadi langkah yang di tempuh pihak pengadaan dengan belanja langsung berarti dalam hal pemilihan penyedia yang di dapatkan dilapangan itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta Surat edaran LKPP nomor 3 tahun 2015 tentang pelaksanaan pengadaan barang Jasa bahwa pengadaan obat-obatan harus melalui belanja *E-Purchasing* bukan melalui belanja langsung, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan

" Pengadaan secara Elektronik dan pengadaan langsung"(Inf 01)

" Pengadaan obat dilakukan dengan metode pemilihan penyedia melalui E-purchasing yaitu login di LPSE dan memilih penyedia yang menyediakan obat yang dibutuhkan" dan terkadang melakukan belanja langsung"(Inf 02)

" Pengadaan melalui E-purchasing serta melakukan belanja langsung yang menyediakan obat yang dibutuhkan dengan menego harga yang sama dengan E-Catalogue atau bahkan

menego harga yang paling murah "(Inf 04)

" Metode Epurchasing (pengadaan langsung) apabila obat sangat dibutuhkan tetapi pesanan melalui E-purchasing belum datang maka akan melakukan belanja langsung"(FGD)

Setelah melakukan telaah dokumen SOP yang dibuat tidak dilaksanakan secara sepenuhnya oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan obat serta ULP dalam melaksanakan pengadaan obat lebih memprioritaskan pengadaan secara Elektronik Katalog.

2. Rencana umum pengadaan obat harus diserahkan kepada PPK

Proses rencana umum pengadaan obat yang diajukan oleh Kepala instalasi Farmasi telah diserahkan kepada PPK untuk dijadikan dasar permintaan obat kemudian di masukkan dalam RBA (Rencana Bisnis Anggaran) RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng

" Iyya rencana umum pengadaan diserahkan sebagai dasar penganggaran di RBA" (Inf 01)

3. Kepala Instalasi Farmasi harus memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Setelah melakukan wawancara mendalam dengan Informan Kunci didapatkan bahwa pada Instalasi Farmasi harus memiliki KAK sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi tetapi kenyataan tidak memiliki KAK dalam pelaksanaan pengadaan,hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Informan Kunci dan Informan Utama

" Laporan KAK tidak ada tetapi hanya menggunakan laporan permintaan obat saja" (Inf 01)

"Kalau KAK tidak memiliki tetapi kami memiliki list kebutuhan obat yang diusulkan oleh kepala instalasi farmasi dan memiliki referensi untuk pengadaan obat"(Inf 02)

4. Adapun cara vendor untuk ikut serta dalam proses pengadaan obat di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng

Adapun cara Vendor untuk ikut serta dalam proses pengadaan obat harus melalui tahap yang telah ditentukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan melakukan langkah yang telah dijelaskan oleh informan sebagai berikut :

" Pejabat Pengadaan/Pokja ULP/PPK melakukan pendaftaran untuk mendapatkan kode akses berupa ID pengguna dan password menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)" (Inf 02)

" Hal ini merupakan kewenangan penuh oleh pihak ULP untuk memilih Distributor yang menyediakan obat yang dibutuhkan oleh rumah sakit"(FGD)

5. Ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi selampengadaan obat melalui E-Purchasing

Kendala yang sering didapatkan pada pemesanan obat dengan menggunakan prosedur *E-Purchasing* adalah prosedur yang telah ditetapkan tetapi ada beberapa kendala dihadapi oleh Pejabat Pengadaan Obat di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng antara lain

- a) Masa jatuh tempo faktur terlalu cepat, apabila belum melakukan pembayaran maka tidak dilayani dalam pemesanan obat berikutnya
- b) Ada beberapa penyedia obat tidak melayani pemesanan dalam jumlah sedikit
- c) Pemenuhan obat di awal tahun sering mengalami kekosongan
- d) Sering didapatkan obatnya sudah tayang di ecatalog ternyata barangnya kosong hal ini dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

" Pengadaan melalui E-Purchasing terkadang ada distributor yang masa jatuh tempo fakturnya terlalu cepat sehingga

kita dibagian ULP kadang tidak dilayani karena sudah terlock fakturnya" (Inf 04)

" Ketidak disiplin distributor sehinggaantisipasi dari perubahan jumlah permintaan kadang tidak terpenuhi serta ada beberapa penyedia yang tidak melayani pemesanan dengan jumlah sedikit"(Inf 02)

" Ada jenis obat nanti tayangnya bukan di awal tahun jadi pemenuhan obat di awal tahun itu sering mengalami kekosongan" (Inf 02)

" Sering juga terjadi obat sudah tayang di E-Catalogue tapi setelah dikonfirmasi ternyata obatnya masih tahap produksi hal ini juga menghambat pelayanan di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng"(Inf 02)

" Kami juga sering mengalami tidak dilayani pesananta karena jumlahnya sedikit selain itu juga ada distributor yang masa jatuh tempo fakturnya hanya 30 hari jadi kalau sudah jatuh tempo belum melakukan pembayaran jadi mereka tidak melayani lagi"(Inf 02)

"Karena E-purchasing merupakan ketentuan dan amanah maka mau tidak mau harus melakukan pengadaan melalui E-Purchasing selain itu memiliki keuntungan juga memiliki kekurangan, keuntungan karena harga yang didaftar itu murah karena sudah harga standar nasional tetapi kekurangan biasa proses pengadaannya lambat apabila distributor yang ditemani kerjasama tidak memiliki Stock jadi harus menunggu lama lagi pemesanan ke pabrikan"(FGD)

Dalam pemilihan penyedia yaitu dengan melaksanakan pemilihan secara E-purchasing tetapi memiliki beberapa kendala yang harus di hadapi yakni terkadang ada distributor (Vendor) yang tidak melayani

pemesanan jumlah sedikit,terkadang ada Vendor masa waktu jatuh tempo Faktur terlalu cepat,Sering juga terjadi obat sudah tayang di E-Catalogue tapi setelah dikonfirmasi ternyata obatnya masih tahap Produksi

b. Tahap perjanjian kontrak

Kontrak pengadaan obat yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa. Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan diketahui perjanjian kontrak dilakukan setelah data-data yang akan dibeli lengkap, kemudian melakukan kontrak dengan distributor /pelaksana pekerjaan yang ditunjuk oleh penyedia. Kesepakatan yang sudah ada menambahkan ketentuan-ketentaun yangharus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kontrak di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppengsering disebut SP atau surat perjanjianapabila sudah menyetujui persyaratan yang sudah diajukan dan bersedia untuk menyediakan obat yang dibutuhkan oleh Pihak RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng, dengan berbagai ketentuan perjanjian kontrak. Pembelian dalam jumlah nominal 50 (lima puluh) juta kebawah hanya dibuatkan Surat Perjanjian biasa atau yang lebih dikenal dengan Nota Pesanan sedangkan untuk pembelian nominal 50 (lima puluh) juta ke atas maka akan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Berdasarkan hasil wawancara mendalam,telaah dokumen dan observasi penelitian maka diperoleh hasil penelitian mengenai Perjanjian kontrak

" Hanya menggunakan Nota Pesanan penganggarannya sampai 50 juta dan untuk surat perintah kerja yang nilai kontraknya 50 juta sampai 200 juta."(Inf 02)

" Setelah melakukan negoisasi maka membuat nota pesanan atau kontrak kerja"(Inf 04)

"Sesuai dengan Peraturan Presiden pengadaan untuk obat dilaksanakan melalui E-purchasing dengan melihat jumlah harganya jika harga dalam satu faktur sampai 50 juta maka hanya menggunakan surat pesanan atau nota pesanan tetapi kalau melebihi nilai 50 juta maka menggunakan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tetapi rata-rata yang digunakan di rumah sakit kita hanya menggunakan nota pesanan saja"(FGD)

Dalam Tahap proses pemesanan obat pada system pengadaan obat secara E-purchasing dilakukan langkah dengan melogin di LPSE untuk mencari Vendor yang akan menyediakan obat yang dibutuhkan di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng, setelah melakukan wawancara dengan informan utama sering melakukan pemesanan obat melalui E-purchasing tapi terlambat datang sehingga melakukan belanja non E-purchasing dengan jenis obat yang sama, tetap terkadang pemesanan obat bersamaan datang hingga hal ini mengalami penumpukan obat dan tidak sesuai lagi dengan perencanaan yang telah diajukan oleh informan kunci, hal ini menyebabkan peningkatan jumlah belanja pengadaan obat di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng, dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :

" Kita login di LPSE dan mencari jenis obat yang dibutuhkan kemudian nego harga setelah itu baru dipesankan di pabrikannya" (Inf 02).

" Pemesanan terkadang mengalami double karena belanja E-purchasing sangat lambat prosesnya jadi alternative yang digunakan belanja langsung dengan jenis obat yang sama hal ini menyebabkan satu jenis obat berlebihan pengadaannya"(Inf 02)

" Dengan melogin di LPSE kemudian memilih distributor yang menyediakan obat yang dibutuhkan, proses pengadaan

yang tau itu tenaga apoteker yang memang merupakan mengetahui seluk beluk pengadaan obat" (Inf 04)

Setelah melakukan Pemesanan obat melalui E-catalogue proses selanjutnya yaitu distribusi/pengiriman obat, berdasarkan hasil wawancara di Instalasi Farmasi sering mengalami keterlambatan pengiriman obat bahkan pernah mengalami barangnya tercecer. Selain itu keterlambatan pengiriman barang karena penyedia obata baru memesan ke pabrik

" Sering sekali kita mengalami kekosongan obat karena keterlambatan pengiriman barang dari distributor"(Inf 02)

" Wii kak pernah satu kali pengiriman barang kita entah nyasar di RS mana sehingga mengalami keterlambatan pengadaaan obatnya"(Inf 03)

" Kalau soal keterlambatan pengiriman seringkali dialamikarena biasa barangnya tercecer karena kemasannya kecil"(Inf 04)

" Keterlambatan pengiriman sering terjadi apalagi kalau pemesanannya di pabrikan pusat bahkan sekarang ada pengadaan kita dipesan mulai dari bulan April sampai sekarang belum datang-datang setelah dikonfirmasi selalu jawaban penyedia sementara dalam proses"(FGD)

" Obat yang tidak sesuai dengan pesanan kalau Jumlah obatnya kurang maka segera meminta kekurangan,tetapi kalau memang betul-betul tidak sama dengan pesanan maka akan dikembalikan (return)"(Inf 02)

" Sering mendapatkan barang tidak sesuai dengan pesanan biasa kurang jumlahnya yang dilaporkan oleh penerima hasil pekerjaan maka akan dikembalikan atau meminta kekurangannya apabila lebih maka akan dikembalikan tetapi biasanya kurangji" (Inf 04)

" Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan maka kami selaku pembuat laporan belum memasukkan ke daftar persediaan menunggu sampai

pengadaan obat sesuai dengan pemesanan”(Inf 03)

“ Setelah melakukan pemeriksaan oleh PPHP baru tidak sesuai dengan pemesanan maka langsung ULP melakukan tindakan dengan mengkonfirmasi pihak penyedia obat dalam hal ini distributor”(FGD)

Adapun yang perlu diperhatikan dalam proses pengiriman barang obat harus sesuai dengan barang yang sudah dipesan melalui *E-Purchasing* karena barang yang dikirim langsung diperiksa oleh bagian PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), apabila tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pihak penyedia, Keterlambatan pengiriman perlu dilakukan Evaluasi kepada pihak ketiga agar tidak menyesepekan perjanjian kontrak yang sudah disepakati

Ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat akan melakukan perjanjian kontrak dengan Pihak Ketiga yaitu Distributor hanya satu kali dalam satu bulan melakukan kunjungan ke RSUD La Temmamala jadi untuk kelengkapan administrasi tidak bisa dilakukan pembayaran hal ini juga menghambat proses pengiriman barang karena belum dilakukan pembayaran

“ Kendala yang sering dihadapi karena terkadang ada distributor volume kunjungannya kerumah sakit hanya satu kali dalam sebulan jadi untuk penandatanganan kelengkapan administrasinya sebagai syarat pembayarannya terhambat juga”(Inf 02)

“ Terkadang kita sudah menyerahkan nota pesanan obat tetapi kemudian hari distributor mengatakan obatnya kosong baru sementara produksi jadi kita membuat lagi nota pesanan untuk distributor yang lain” (Inf 02)

“ Ada distributor tidak terlalu memperhatikan administrasi yang dia

hanya perlukan kecepatan pembayaran dan SSP pajaknya”(Inf 04)

PEMBAHASAN

a. Tahap persiapan

Dalam penelitian ini kegiatan untuk tahap persiapan maka akan dilakukan perencanaan melalui metode konsumsi yaitu mengestimasi kebutuhan obat berdasarkan penggunaan obat sebelumnya, selain itu mengkompilasi dengan system epidemiologi yaitu memperhatikan trend penyakit yang ada di RSUD La Temmamala kabupaten Soppeng. Perencanaan yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi akan di ajukan ke bidang perencanaan untuk dianggarkan untuk pengadaan obat. Setelah di anggarkan namun anggaran tidak mencukupi kebutuhan obat di Instalasi Farmasi maka memperhatikan lagi system Ven yaitu menetapkan prioritas pengadaan obat dimana anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.menggunakan system Ven maka dibagi menjadi tiga bagian dari pengadaan obat berdasarkan :

1. Vital yang termasuk dalam kelompok ini antara lain
 - a. Obat penyelamat (Life Saving drugs)
 - b. Obat untuk pelayanan kesehatan pokok (Vaksin,dll)
 - c. Obat untuk mengatasi penyakit-penyakit penyebab kematian terbesar
2. Esensial
Adalah kelompok obat yang bekerja kausal yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit.
3. Nonesensial
Merupakan obat penunjang yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan.

Pengadaan obat yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah La temmmala Kabupaten Soppeng sebagian telah melaksanakan pengadaan obat dengan prosedur *E-Purchasing* yaitu tata cara

pengadaan obat melalui system katalog elektronik.

Kendala yang sering dihadapi yaitu terjadi perbedaan perencanaan dengan riil kebutuhan karena semakin meningkatnya jumlah kunjungan pasien di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng. Selain itu juga perencanaan anggaran yang disediakan oleh manajemen tidak mencukupi kebutuhan yang diajukan oleh Instalasi Farmasi.

RSUD La Temmamala sudah menganut system Badan Layanan umum Daerah maka kita diberikan hak penuh untuk mengatur dan mengelola pendapatan yang diterima olehnya itu selaku tim perencanaan anggaran untuk pengadaan selalu meminta data-data jumlah penggunaan obat supaya bisa melakukan perubahan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) pertriwulan jangan pada saat perubahan anggaran Pokok baru melakukan perubahan RBA

Kebijakan pengadaan obat berdasarkan E-catalogue ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan obat. Terdapat beberapa proses pengadaan obat secara E-Purchasing, proses pengadaan di dukung beberapa tahap mulai dari tahap persiapan pengadaan, pemilihan penyedia serta perjanjian kerjasama

b. Tahap pemilihan penyedia

Tahap pemilihan penyedia untuk pengadaan obat di RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng sebagian dilakukan secara pengadaan elektronik yaitu melalui system *E-purchasing*, tetapi ada juga belanja obat secara belanja langsung tanpa melalui e-purchasing hal ini tidak sesuai dengan aturan yaitu berdasarkan surat edaran LKPP serta peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Adapun Metode pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai 3 (tiga) cara, yaitu pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan pemilihan langsung. Metode pemilihan langsung dalam proses pengadaan yang ditetapkan pada tahap perencanaan pemilihan penyedia menjadi tanggung jawab dari pokja ULP atau pejabat pengadaan

dalam memutuskan metode yang digunakan untuk mendapatkan barang/jasa yang diperlukan di rumah sakit (Luqman, 2016)

c. Tahap perjanjian kontrak

Setelah Unit Layanan pengadaan (ULP) melakukan pemilihan penyedia dan melakukan negoisasi harga maka akan melakukan perjanjian kontrak kerjasama dalam hal pelayanan pengadaan obat-obatan. Ada beberapa penyedia yang memberikan masa tenggang waktu pembayaran 35 hari, 45 hari, 60 hari bahkan ada yang sampai 120 hari (Vendor tertentu yang pengadaannya seperti RL). Setelah melakukan perjanjian kontrak baik bentuknya dalam nota pesanan yang jumlah penganggarannya sampai 50 juta atau surat perintah kerja yang nilai kontraknya 50 juta sampai 200 juta. Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan pengadaan obat secara E-Purchasing sesuai dengan permintaan Instalasi Farmasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16, 2018)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan yang berjudul analisis pengelolaan obat pada tahap pengadaan di Instalasi Farmasi RSUD La temammala Kabupaten Soppeng, maka peneliti menarik kesimpulan:

1. Pada tahap persiapan dimulai dari perencanaan obat untuk menentukan jenis, jumlah, serta waktu pemesanan di Instalasi Farmasi RSUD La temmmala Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan oleh Kepala Instalasi Farmasi dilakukan berdasarkan metode konsumsi.
2. Untuk tahap pemilihan penyedia sebagian pengadaan obat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah termasuk Surat Edaran LKPP dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 akan tetapi masih ada juga belanja obat yang dilakukan tanpa melau E-Purchasing.
3. Pada tahap akhir yaitu pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam hal ini perjanjian kontrak. Setelah Unit Layanan

pengadaan (ULP) telah melakukan pemilihan penyedia dan melakukan negosiasi harga.

SARAN

Adapun saran dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Sebaiknya dibentuk tim perencanaan pada Instalasi Farmasi RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng, agar dalam penyusunan perencanaan tidak hanya berdasarkan jumlah pagu anggaran tahun sebelumnya
2. Dalam pengadaan obat sebaiknya menjamin ketersediaan obat pada distributor dan mengantisipasi kekosongan obat dengan menyediakan *Buffer stock*
3. Untuk pemilihan penyedia sebaiknya memilih Distributor yang memang bersedia menyediakan obat dalam waktu yang cepat agar menghindari kekosongan obat di Instalasi Farmasi
4. Untuk tahap perjanjian kontrak sebaiknya memperhatikan isi kontrak dan masa waktu kontrak agar bisa memberikan warning kepada penyedia untuk segera melakukan pengiriman pemesanan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Taufiq. (2016). Perencanaan, Pengadaan, dan Distribusi Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit.
- Ahmad Wiki. (2014). *Manajemen Logistik, Pedoman Praktis bagi sekretaris dan Staf Administrasi* Jakarta: PT.Grasiendo.
- Aji, R. P. (2017). Analisis implementasi system informasi pengadaan obat pada instalasi farmasi rumah sakit. *Analisis implementasi system informasi pengadaan obat pada instalasi farmasi rumah sakit.*
- Ardiyanti, R., & Darmawan, E. S. (2014). *Analisis Pelaksanaan Sistem Manajemen Logistik Barang Umum RSUD Kota Depok* Universitas Indonesia, Jakarta.

Budiharjo Hardjowijono dan Hayie Muhammad. (2008). Procurement (Pengadaan Barang) menurut Para Ahli.

Christopher & Schooner. (2007). Incrementalism Eroding the Impediment to Global Public Procurement Market. *Journal of International Law.*

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2010). *Penggunaan Obat Bebas dan Obat Terbatas*. Jakarta.

Donald J.Bowersok. (2002). *Manajemen Logistik* Jakarta: Bumi Aksara.

Febriani, S. H., & Chalidyanto, D. (2016). Pengelolaan Sediaan Obat pada Logistik Farmasi Rumah Sakit Umum Tipe B di Jawa Timur. *Administrasi Kesehatan Indonesia*, 4(2), 137.

Freddy Rangkuti. (2007). *Manajemen Persediaan*. Jakarta: Rajawali.

Henni Febriawati. (2013). *Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gosyen, Kedokteran dan Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Profil Kesehatan Indonesia* Jakarta.

Kepmenkes Nomor 1197/MENKES/SK/X. (2004). *Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit* Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII. (1986). *Tanda Khusus obat Keras*. Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197/SK/MENKES/X. (2004). *Standar Pelayanan di Rumah Sakit*. Jakarta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18. (2000). *Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, metode pengadaan perbekalan farmasi* Jakarta.

Laporan Keuangan RSUD La temmamala. (2017). *Laporan Keuangan BLUD RSUD La temmamala Kabupaten Soppeng*. Watansoppeng

- Latjandu, N. C. (2017). Analisis Perencanaan dan pengadaan obat bagi pasien Peserta JKN kesehatan nasional di RSUP Prof.DR.R.Kandau Manado. *Analisis Perencanaan dan pengadaan obat bagi pasien Peserta JKN kesehatan nasional di RSUP Prof.DR.R.Kandau Manado*.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2016). *Pedoman tata cara pengadaan/jasa*.
- Luqman, M. (2016). *Analisis Penerapan Pengadaan Obat Secara E-Purchasing di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan*. Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.